

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Transmigrasi

Transmigrasi, berasal dari bahasa Latin, *transmigratus* yang diambil oleh bahasa Inggris menjadi *transmigration*, dari akar kata *migrate* bermakna berpindah tempat (Ramadhan, 1993). Transmigrasi adalah salah satu bentuk realokasi sumberdaya manusia sebagai suatu mekanisme penyeimbang yang akan memindahkan modal manusia dari suatu tempat ke tempat lain yang relatif dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, ditetapkan bahwa transmigrasi adalah pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah menetap ke daerah lain yang ditetapkan atau di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

a. Tahapan Pembinaan Transmigrasi

Menurut KEP 06/MEN/1999, secara umum terdapat beberapa tahapan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi pada Transmigrasi Umum (TU) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dilakukan melalui tahap penyesuaian, tahap pemantapan dan tahap pengembangan dengan jangka waktu yang berbeda dan berlaku spesifik pada setiap pola kegiatan usaha pokok transmigrasi, yaitu:

1) Tahap Penyesuaian (T+2)

Tahap ini merupakan tahap adaptasi terhadap lingkungan, dalam arti penyesuaian terhadap jenis dan manajemen usaha tani, lingkungan alam musim, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Sasaran yang ingin dicapai adalah transmigran mampu menguasai kegiatan produksi yang telah dipilih/ditetapkan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Pada akhirnya tercapai kondisi kehidupan transmigrasi yang memiliki kepercayaan diri terhadap kehidupan barunya dan mantap dalam melaksanakan kegiatan usaha yang memungkinkan untuk berkembang lebih lanjut. Tahap ini berlangsung selama satu setengah tahun.

2) Tahap Pematapan (T+3)

Pada tahap ini, bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan hidup transmigran. Transmigran harus telah berkembang kemampuannya, sehingga seluruh aset produksi dapat dikelola sepenuhnya. Kemandirian transmigran dalam proses produksi dan usaha juga telah terbentuk, yang berarti tingkat partisipasi transmigran dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah dilakukan secara optimal. Tahap ini berlangsung selama satu setengah tahun sampai dengan dua tahun.

3) Tahap Pengembangan (T+4)

Pada tahap pengembangan, diupayakan agar transmigran dapat melakukan pengembangan usaha produktif secara mandiri. Transmigran telah melakukan intensifikasi atau diversifikasi kegiatan usaha. Sehingga diakhir tahap ini, tingkat kehidupan mandiri tercapai, dimana transmigran mampu

mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif. Tahap ini berlangsung kurang lebih selama dua tahun.

b. Program Transmigrasi Lokal di Desa Karangsewu, Galur, Kulonprogo.

Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, secara bertahap melalui fasilitas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, paket teknologi, pembinaan sosial budaya dan ekonomi, serta kelembagaan yang diarahkan untuk peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Oleh karena itu, perkembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang tersebar diberbagai daerah dapat diartikan sebagai bagian pemerataan pembangunan, dan dalam kurun waktu panjang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan (Puguh, 2002).

Program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merupakan program transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal adalah pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang masih satu Pemerintah Daerah Provinsi. Program transmigrasi ini, selain untuk menanggulangi kepadatan penduduk, juga untuk menanggulangi penduduk Kecamatan Samigaluh yang daerahnya rawan akan bencana longsor sehingga memberikan tempat tinggal yang aman dengan dipindahkan ke daerah pesisir pantai di Kecamatan Galur.

2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga keuangan (finansial institution) adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dana dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit defisit),

(Manurung dan Rahardja, 2004). Lembaga ini merupakan lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana (unit defisit) dengan pihak yang kelebihan dana (unit surplus). Dalam unit usaha peran lembaga tersebut sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan usaha melalui pemberian kredit untuk mengembangkan usaha.

Kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam berhubungan langsung dengan lembaga keuangan karena kebijakan perkreditan yang ketat, menyebabkan munculnya lembaga keuangan mikro (LKM). Sebagai bagian dari sistem keuangan mikro, LKM telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memberdayakan rakyat miskin atau kecil. Pada saat intermediasi sektor perbankan belum berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM semakin penting dalam menggerakkan sektor riil (Abdullah, 2004).

LKM secara umum dikelompokkan dalam dua jenis yaitu *formal* dan *non formal* (Abdullah, 2004). LKM formal, misalnya bank (seperti BPR, dan BRI Unit) dan non bank seperti KSP atau USP (termasuk *Credit Union* atau Koperasi Kredit), LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan) dan pegadaian. Sedangkan LKM *non formal*, misalnya KSM atau LSM (Kelompok atau Lembaga Swadaya Masyarakat), BMT (Baitul Maal wa Tamwil), LEPM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri), dan UESDP (Unit Ekonomi Desa Pinjam).

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro disebut dengan lembaga keuangan mikro (LKM). Definisi LKM itu sendiri adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*), kredit (*loan*),

pembayaran berbagai transaksi serta *money transfer* yang ditujukan untuk masyarakat kecil dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Berkembangnya lembaga kredit formal atau bank umum yang ada dipedesaan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku usaha dirasakan masih kurang untuk dapat memenuhi sumber permodalan.

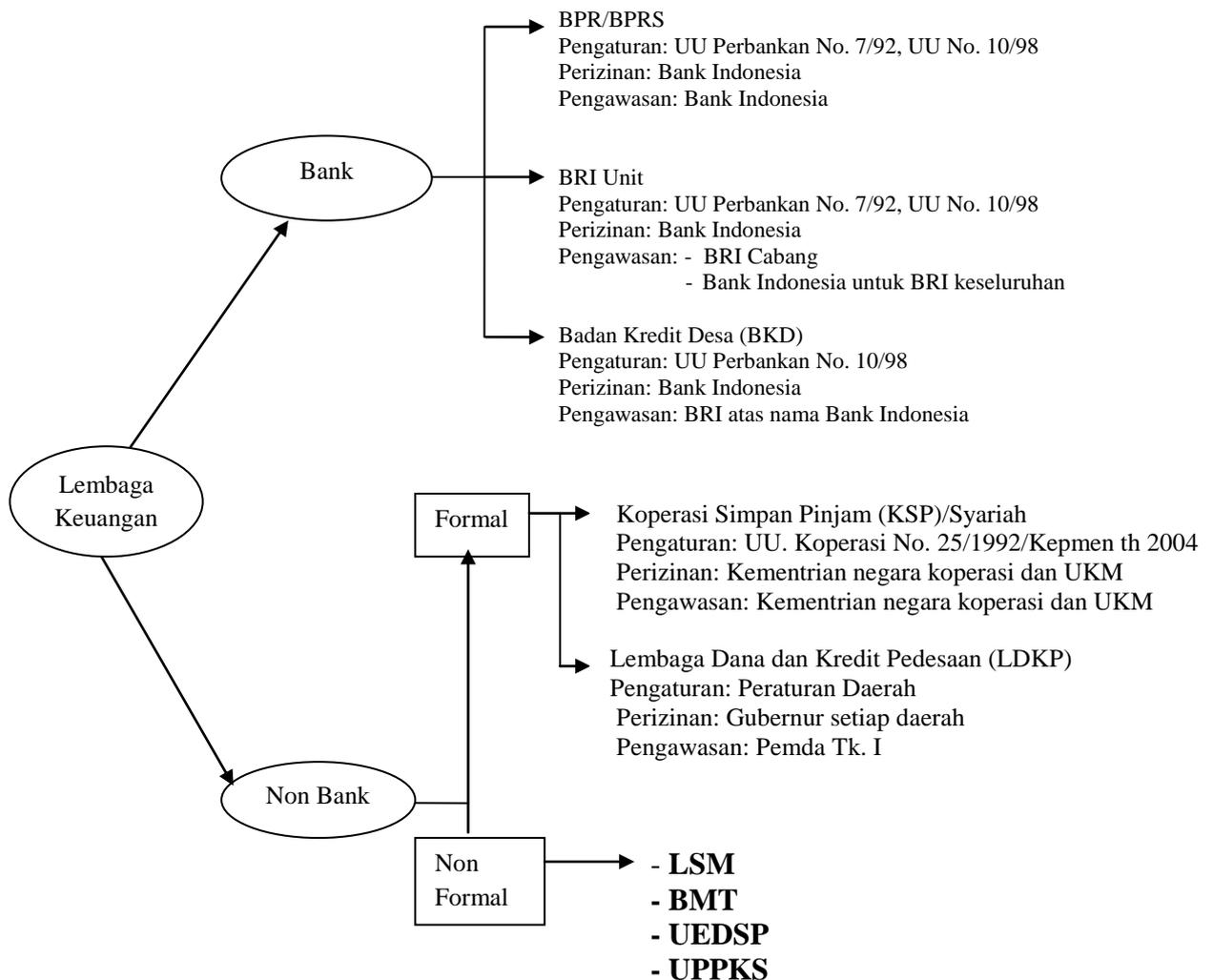
Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang perlu dana. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien lembaga keuangan hadir sebagai penyedia jasa kepada setiap tipe dan lapisan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. LKM di Indonesia telah membuktikan bahwa:

- a. Tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani UKM
- b. Diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM)
- c. Mandiri dan mengakar di masyarakat
- d. Jumlah cukup banyak dan penyebarannya meluas
- e. Berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau (melayani) anggota masyarakat
- f. Memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi anggotanya (tanpa agunan)
- g. Membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok tani
- h. Mengurangi berkembangnya pelepas uang (*informal money lenders*)

- i. Membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat
- j. LKM dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM bukan bank dapat kembali dinikmati oleh para nasabah sebagai pemilik

Keunggulan di atas menyebabkan LKM sangat penting dalam pengembangan usaha kecil karena merupakan sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh UKM (terutama usaha mikro). LKM yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggarannya sesuai dengan syariat islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank khusus (bank muamalat) dan bank lain serta BPR-S, sedangkan yang terbentuk bukan bank terdiri dari Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang dikembangkan oleh Baitul Mal Muhammadiyah dan koperasi syirkah Muawanah yang digairahkan oleh pesantren-pesantren. Status legalnya ada yang terbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terikat dengan institusi pengembang.

Di masa sekarang, hadirnya lembaga keuangan menjadi alternatif pilihan sebagai sumber pembiayaan dan BMT Center (dalam Fauziah 2006) menggambarkan bentuk dan regulasi lembaga keuangan mikro di Indonesia sebagai berikut :



Gambar 1. Bentuk dan regulasi LKM di Indonesia.

3. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Menurut Rasyid (2001) mendefinisikan BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kehadiran BMT dalam perekonomian nasional sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai tujuan dan target yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai BMT diantaranya untuk mengembangkan konsep ekonomi yang sesuai syariah sehingga terhindar dari praktek riba, membina pengusaha kecil agar mampu mandiri dan senantiasa mendorong masyarakat untuk berwirausaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Adapun target yang ingin diraih BMT adalah terwujud masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, teratasinya masalah kemiskinan dan terwujudnya masyarakat yang mandiri (Yudono, 2002).

Ridwan (2004) menyatakan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal* yaitu lembaga bisnis yang bermotif laba.

BMT (Baitul Maal wat Tanwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Aziz, 2004).

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Maal.

- i) ***Baitul Tamwil*** (Bait = rumah, at Tamwil = pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

- ii) *Baitul Maal* (Bait = rumah, Maal = harta), menerima titipan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1997). Menurut Priyono dan Pranaka (1996) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan primer menekan proses pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. *Kedua*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Seringkali kecenderungan primer terwujudnya melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat akan berdampak bahwa masyarakat akan menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali kebutuhannya dan dilatih

untuk dapat merumuskan rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dalam hal ini, praktisi pembangunan berperan dalam memfasilitasi proses dialog, diskusi, curah pendapat dan mensosialisasikan temuan masyarakat.

b. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijer dan Saise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam yaitu :

- i) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- ii) Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- iii) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- iv) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- v) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah, dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan

sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan (Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

c. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Menurut Kartasmita (1997:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan dengan tiga cara:

- i) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi,

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- ii) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (Sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan.
- iii) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

d. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga pihak luar tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan

yaitu bukan hanya dijadikan objek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Wahab dkk (2002: 81-82) ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

- i) *The welfare approach*, pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan memberdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
- ii) *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberadaan masyarakat.
- iii) *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Sedangkan menurut Suharto (1997:218-219), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

- i) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- ii) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- iii) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat.
- iv) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- v) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

e. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004: 83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- i) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- ii) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- iii) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengatarkan pada kemandirian.

Selanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat tersebut dalam tabel bawah ini:

Tabel 1. Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat

TAHAPAN AFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sulistiyani, 2004

f. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Agar kita dapat melakukan analisis dan pemahaman yang tepat mengenai pemberdayaan masyarakat, harus dipahami dulu kerangka konseptual mengenai lingkup pemberdayaan. Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di

masyarakat, Alshop dan Heinshon (dalam Sumaryadi, 2005) menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, sedangkan Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005) menyebutkan satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yang meliputi aspek-aspek penegakan keadilan, kemampuan politik, dan pelayanan publik.

Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktivitas dalam bidang ekonomi, dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi. Menurut Ismed Firdaus dan Ahmad Zaky (2008:226) mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang pemberdayaan yaitu :

- i) Aset manusia (*human asset*) berkaitan erat pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusianya. *Human capital* ini termasuk pada golongan aset tidak nyata. *Human asset* secara umum meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Usaha-usaha meningkatkan *human asset* ini biasanya dilakukan dalam berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan ketrampilan dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output pada peningkatan kualitas SDM.

- ii) Aset modal keuangan (*finansial aset*), meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen produksi lainnya. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi para pelaku perekonomian adalah sulitnya mendapatkan modal kredit usaha. Ketidakmampuan dan ketidaksiapan mereka dalam memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank menjadi sulitnya dana usaha terealisasi. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak memiliki aset yang cukup untuk menjamin kepada pihak bank.
- iii) Aset modal sosial (*social asset*). Aset modal sosial meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi, dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit, dan tipe aset lainnya.

Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya. Sedangkan, untuk pemberdayaan lingkungan adalah upaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjalin hubungan baik dalam interaksi manusia dengan lingkungannya

g. Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya.

Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, diharapkan masyarakat memiliki budaya yang proaktif untuk kemajuan bersama, mengenal diri dan lingkungannya serta memiliki sikap bertanggung jawab dan memposisikan dirinya sebagai subyek dalam upaya pembangunan di lingkungannya.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- i) Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- ii) Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

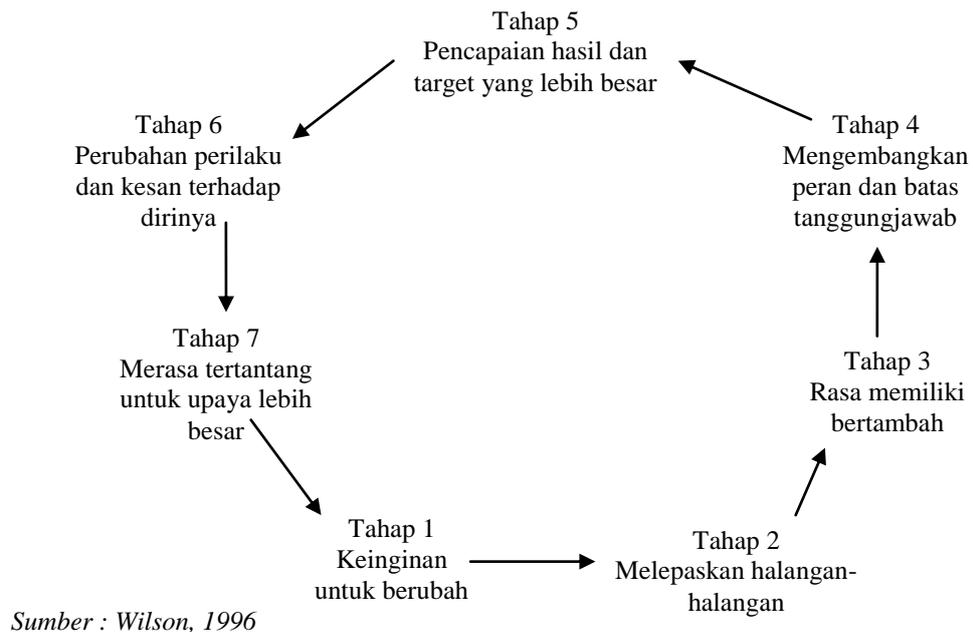
- iii) Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
- iv) Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
- v) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang berkepentingan mikro.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada satu tahapan tertentu, akan tetapi harus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Menurut Wilson (dalam Sumaryadi 2005) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya.

Tahap keempat lebih merupakan kelanjutan dari tahap ketiga yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitasnya untuk mengikuti perjalanan ke arah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Gambar di bawah ini menunjukkan siklus pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas.

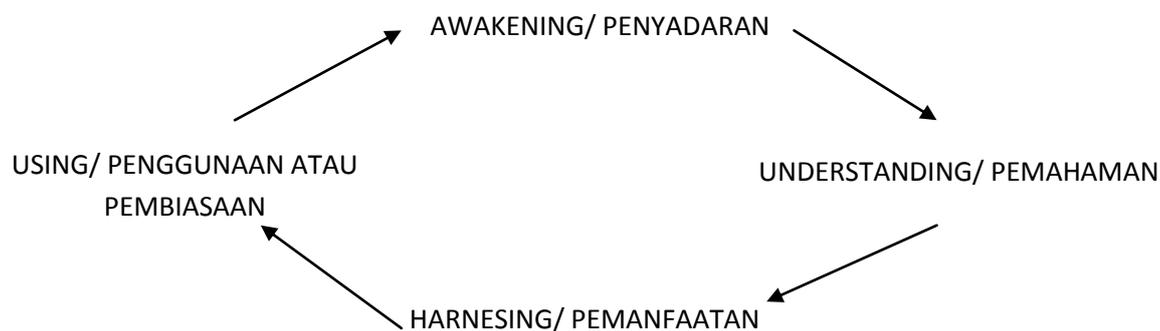


Gambar 2. Siklus Pemberdayaan

Proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson (1996) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

- i) *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- ii) *Understanding* atau pemahaman lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat dengan memberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.

- iii) *Hamessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka menggunakannya untuk kepentingan komunitasnya.
- iv) *Using* atau menggunakan ketrampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.



Sumber : Wilson, 1996

Gambar 3. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaian memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996).

5. Modal Sosial

Menurut Putnam, et al (dalam Suharto, 2006) menyatakan modal sosial adalah penampilan organisasi, seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama.

Menurut Fukuyama (1995) menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari kepercayaan (*trust*) dalam sebuah komunitas.

Menurut Eva Cox (1995) menyatakan modal sosial adalah suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Menurut Narayan (dalam Suharto, 2006) menyatakan modal sosial adalah aturan-aturan, norma-norma, kewajiban-kewajiban, hal timbal balik dan kepercayaan yang mengikat dalam hubungan sosial, struktur sosial dan pengaturan-pengaturan kelembagaan masyarakat yang memungkinkan para anggota untuk mencapai hasil sasaran individu dan masyarakat mereka.

Dari berbagai sumber mengenai definisi modal sosial di atas, maka pengertian modal sosial dapat disimpulkan sebagai sumber daya yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu maupun institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial akan tumbuh dan berkembang ketika digunakan secara bersama-sama dan akan mengalami kepunahan ketika tidak dilembagakan secara bersama, oleh karena itu pewarisan nilai modal sosial dilakukan melalui proses adaptasi, pembelajaran, serta pengalaman dalam praktek nyata.

6. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari

bahasa latin "strategos" yang merupakan gabungan dari "stratos" atau tentara dan "agos" atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus yang dikutip oleh Husein Umar (2003:31) bahwa strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah, pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal, Sumodiningrat (1990:191)

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : pemberdayaan masyarakat, pemberian otonomi atau wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya dan modernisasi perubahan struktural sosial ekonomi dan budaya yang semuanya atas peran dari masyarakat lokal.

B. Kerangka Pemikiran

Pengertian program transmigrasi merupakan upaya pemerintah dalam penyebaran penduduk pada daerah yang masih kurang penduduknya dan daerah

tujuan tersebut memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan. Berbeda dengan kawasan transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yaitu program transmigrasi lokal yang artinya adalah memindahkan penduduk masih dalam satu kawasan saja dengan alasan daerah rawan bencana. Transmigrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo adalah dengan melakukan transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk dalam satu kawasan dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai selatan Kulonprogo untuk dikembangkan menjadi pemukiman dan lahan produksi bagi penduduk yang dipindahkan dari lokasi bencana.

Pemikiran awal yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah berangkat dari isu utama perubahan konsep pemberdayaan dari yang bersifat *top down* menjadi pendekatan yang bersifat *bottom up* yang senantiasa mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkup komunitasnya. LKM BMT-Trans merupakan lembaga keuangan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat transmigrasi. Sejak tahun 2008 di Lokasi Transmigrasi Karangsewu atas inisiatif swadaya masyarakat telah berdiri LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui kemudahan yang diberikan dalam pembiayaan dana bagi aktivitas ekonomi dan adanya strategi pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat transmigrasi lokal. Dalam perumusan pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui profil LKM BMT Trans Ngudi Makmur di kawasan transmigrasi lokal yang berdiri atas inisiatif masyarakat transmigrasi lokal dengan meninjau beberapa poin, diantaranya adalah (1) Latar belakang program dari transmigrasi

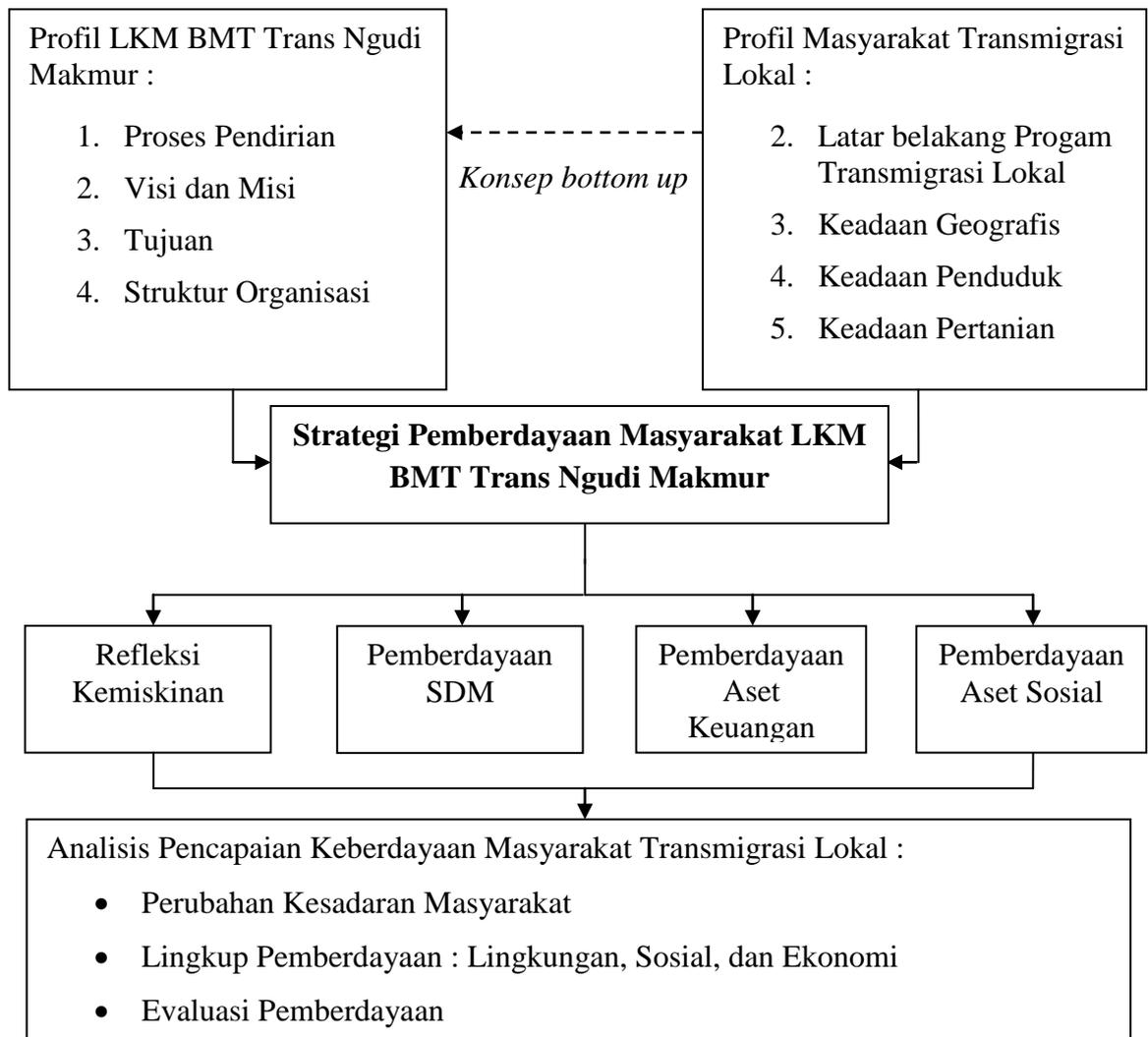
lokal Ring 1 perlu diketahui untuk informasi tentang diadakannya program transmigrasi lokal. (2) Letak Geografis perlu diketahui untuk informasi dan memastikan keberadaan kawasan transmigrasi lokal di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo. (3) Keadaan Penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk, usia, pekerjaan dan pendidikan masyarakat transmigrasi lokal perlu diketahui untuk informasi terhadap proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. (4) Keadaan Pertanian perlu diketahui sebagai informasi mengenai komoditas yang ditanam dan sarana prasarana di kawasan transmigrasi lokal.

Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang perkembangan strategi pemberdayaan masyarakat, karena selama ini laporan pelaksanaan pemberdayaan lebih banyak diukur dari tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur, selain perannya sebagai intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat transmigrasi lokal adalah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat transmigrasi lokal hingga mencapai kondisi masyarakat yang berdaya. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur melalui implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada masyarakat transmigrasi lokal adalah sebagai berikut : (1) Refleksi Kemiskinan, karena dari kondisi awal yang belum berdaya masyarakat harus disadarkan tentang seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk kemudian diberikan pemahaman bahwa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik hanya mereka sendiri yang bisa

mengusahakannya karena merekalah yang mengetahui kebutuhan dan peluang-peluang yang ada. (2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia adalah tahapan selanjutnya setelah refleksi kemiskinan dengan memberikan ketrampilan agar masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk kemajuan dirinya dan komunitasnya. (3) Pemberdayaan Aset Keuangan dengan memberikan kemudahan akses permodalan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat transmigrasi lokal. (4) Pemberdayaan Aset Sosial adalah dengan mengupayakan keberlangsungan usaha yang dimiliki masyarakat transmigrasi lokal melalui akses jaringan kemitraan usaha dan informasi peluang pasar.

Pemberdayaan dalam rangka percepatan pertumbuhan kawasan transmigrasi lokal dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat transmigrasi lokal tentunya tidak mudah dalam aplikasi pemberdayaan masyarakat dengan melihat kondisi awal masyarakat transmigrasi lokal yang heterogen tinggal dalam satu wilayah. Namun, fakta yang terjadi LKM BMT Trans Ngudi Makmur dikawasan masyarakat transmigrasi lokal sebagai penyedia jasa permodalan dalam pemberdayaan ekonomi mampu beroperasi dengan dana swadaya masyarakat transmigrasi lokal mencapai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan data pada tahun 2012 asset LKM BMT Trans Ngudi Makmur sudah mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal perlu diketahui strategi dan program dalam membina masyarakat transmigrasi lokal untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui BMT Trans Ngudi Makmur.

Dalam rumusan isu utama di atas, maka peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran mengenai pencapaian keberdayaan masyarakat transmigrasi lokal ditinjau pada implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, dibuat alur berpikir yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Bagan kerangka pemikiran